

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan atas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan atas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia diatur di dalam undang-undang pemilu yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialist*). Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu dan tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHAP. Karena menganut asas *lex specialist derogate lex generali*, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama). Ketentuan Undang-undang pemilu tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai *in absentia* dalam hal penanganan tindak pidana pemilu. Tidak ada aturan atau pasal (kekaburan hukum) yang mengatur dan bersifat mengikat seorang terdakwa mengenai *in absentia* pada proses penanganan tindak pidana pemilu; 2) Kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia bahwa kebijakan peradilan *in absentia* memungkinkan pengadilan untuk mempercepat proses peradilan dan mencegah penyimpangan dalam proses hukum. Penundaan persidangan bisa sangat mempengaruhi kasus, terutama jika alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, tidak dapat mendukung pembuktian perkara. Di sisi lain kebijakan peradilan *in absentia* dapat membahayakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan harus memberikan kesempatan yang adil bagi tersangka atau terdakwa untuk menyampaikan pembelaan mereka, bahkan jika mereka tidak hadir di persidangan.

Kata Kunci: *Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Pemilu, Hukum Acara Pidana*

TRIAL IN ABSENTIA IN ELECTION CRIMES IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL PROCEDURE IN INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to 1) determine and analyze the regulation on in absentia trials in election crimes in Indonesia; 2) determine and analyze the criminal procedure policy on in absentia trials in election crimes in Indonesia. The research method used is the normative legal research method and the approach used is the statutory approach and conceptual approach and case approach. The analysis of legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study indicate that 1) The regulation on in absentia trials in election crimes in Indonesia is regulated in the election law which is a special law (lex specialist). In general, election crimes regulated in the election law and the procedures for their settlement refer to the Criminal Procedure Code. Because it adheres to the principle of lex specialist derogate lex generali, the rules in the election law are more important). There are no provisions in the election law that explicitly regulate in absentia in terms of handling election crimes. There are no rules or articles (legal ambiguity) that regulate and are binding on a defendant regarding in absentia in the process of handling election crimes; 2) The policy of criminal procedure law on in absentia trials in election crimes in Indonesia is that the in absentia trial policy allows the court to accelerate the trial process and prevent deviations in the legal process. Delays in trials can greatly affect cases, especially if the evidence and evidence presented at trial cannot support the proof of the case. On the other hand, the in absentia trial policy can endanger the rights of suspects or defendants. Therefore, the court must provide a fair opportunity for suspects or defendants to present their defense, even if they are not present at the trial.

Keywords: Trials in Absentia, Election Crimes, Criminal Procedure